

# STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2016-2017



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

# **STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI**

## **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2016-2017**



*<https://yogyakarta.bps.go.id>*



**STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2016 - 2017**

**ISBN** : 2598-2664  
**Nomor Publikasi** : 34540.1802  
**Katalog** : 7203007.34

**Ukuran Buku** : 21 cm x 29,7 cm  
**Jumlah Halaman** : xii + 62 halaman

**Naskah :**  
Bidang Statistik Distribusi

**Penyunting :**  
Bidang Statistik Distribusi

**Gambar Kulit :**  
Bidang Statistik Distribusi

**Diterbitkan oleh :**  
© BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

**Dicetak oleh :**  
UD. PELANGI

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

**Tim Penyusun**

**STATISTIK KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2016 - 2017**

**Pengarah :**

Johanes De Britto Priyono, M.Sc.

**Penanggung Jawab Teknis:**

Arjuliwondo, S.Si.

**Editor :**

Chatarina Budi Anggarini, S.ST, M.M.

**Penulis :**

Sudiyana, S.E, M.M.

**Pengolah Data :**

Sudiyana, S.E, M.M.

**Desain/Layout :**

Sudiyana, S.E, M.M.

## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi DI. Yogyakarta tahun anggaran 2016-2017 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang secara teratur telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini menyajikan data mengenai Realisasi APBD 2016 dan APBD 2017 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk perbaikan publikasi di masa mendatang, tanggapan dan saran-saran dari konsumen data sangat diharapkan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, April 2018

Badan Pusat Statistik  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

  
Kepala,  
**Johanes De Britto Priyono, M.Sc.**





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>I. PENJELASAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
1.1. Pendahuluan .....	1
1.2. Ruang Lingkup .....	2
1.3. Konsep dan Definisi .....	2
<b>II. ULASAN RINGKAS .....</b>	<b>9</b>

### Tabel-Tabel

1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 .....	10
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 .....	12
3. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2016.....	13
4. Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 .....	14
5. Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.....	15
6. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 .....	17
7. Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2016 .....	17
8. Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 .....	18
9. Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 .....	19

10. Persentase Belanja Tidak Langsung Terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2012- 2017.....	20
11. Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 .....	21
12. Persentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 .....	22
13. Persentase Rencana Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 .....	23

### **Lampiran Tabel**

1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 (000 Rp).....	27
1.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 (000Rp) .....	28
1.3. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 (000 Rp)	29
1.4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (000 Rp).....	30
1.5. Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (000 Rp) .....	31
1.6. Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (000 Rp). ....	32
2.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo 2016 (000 Rp).....	33
2.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo 2016 (000 Rp) .	34
2.3. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo 2016 (000 Rp) .....	35
2.4. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2017 (000 Rp).....	36
2.5. Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo 2017 (000 Rp). ....	37
2.6. Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo 2017 (000Rp.) .. ....	38
3.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2016 (000 Rp) .....	39

3.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2016 (000 Rp) .....	40
3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2016 (000 Rp) .....	41
3.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000 Rp). ....	42
3.5 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000 Rp) .....	43
3.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000 Rp)..	44
4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 (000 Rp) .....	45
4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2016 (000 Rp)..	46
4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2016 (000Rp) .....	47
4.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017 (000 Rp).....	48
4.5 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017 (000 Rp).....	49
4.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017 (000Rp).....	50
5.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2016 (000 Rp).....	51
5.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2016 (000 Rp) .....	52
5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2016 (000 Rp) .....	53
5.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 (000 Rp). .....	54
5.5 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2017 (000Rp).....	55
5.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2017 (000 Rp). .....	56
6.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2016 (000 Rp).....	57
6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2016 (000 Rp)	58
6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2016 (000 Rp) .....	59

6.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2017 (000 Rp).....	60
6.5 Rencana anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta 2017 (000 Rp)	61
6.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2017 (000 Rp).....	62

#### **Gambar- Gambar**

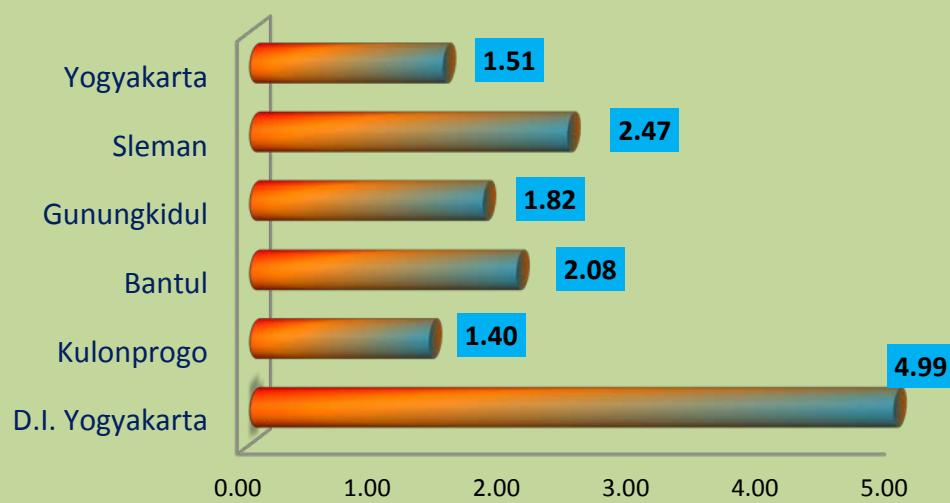
1. Komposisi Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 (persen). .....	13
2. Komposisi Realisasi Belanja Menurut Belanja Langsung dan Tidak Langsung di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 (persen). .....	19



# Realisasi Pendapatan Daerah 2016 (Triliun Rupiah)



## APBD 2017 (Triliun Rupiah)





## I. PENJELASAN UMUM

### I.1. Pendahuluan

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk mendapatkan dan meningkatkan serta menggali sumber-sumber potensi daerah. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2013 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu data statistik mengenai keuangan daerah menjadi semakin diperlukan dalam rangka keperluan kelengkapan informasi tentang keuangan negara, analisis dan pengambilan keputusan. Kegunaan data keuangan daerah antara lain :

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi secara makro seperti pendapatan regional, tabel input output, dan neraca arus dana.
2. Memberikan informasi tentang realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi pemerintah pusat, untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah.

## **I.2. Ruang Lingkup**

Pengumpulan data statistik keuangan daerah dibedakan antara lain :

1. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dikumpulkan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **I.3. Konsep dan Definisi**

### **I.3.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

#### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

##### **1.1. Pajak Daerah**

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

## **1.2. Retribusi Daerah**

Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi dalam tiga bagian yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Contoh retribusi jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Contoh retribusi jasa usaha antara lain pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi usaha daerah, dan lain-lain. Contoh retribusi perijinan tertentu antara lain izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain-lain.

## **1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

## **1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan lain-lain.

## **2. Dana Perimbangan**

Adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan ini terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

## **2.1. Bagi Hasil Pajak.**

Bagi hasil pajak terdiri dari bagian penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

## **2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.**

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

## **2.3. Dana Alokasi Umum.**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

## **2.4. Dana Alokasi Khusus.**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

### **3. Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Adalah penerimaan dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Penerimaan lainnya terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

#### **I.3.2 Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari:

##### **1. Belanja Tak Langsung**

Belanja tak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Kelompok belanja tak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

##### **2. Belanja Langsung**

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan.

Belanja langsung meliputi :

- Belanja Pegawai.
- Belanja Barang dan Jasa.
- Belanja Modal.



# ULASAN



http://www.bps.go.id



## II. ULASAN RINGKAS

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian wewenang ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memenuhi azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pertambuan. Penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Wujud otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimalkan pengeluaran.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Selanjutnya, berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisanya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Pada Tabel.1 dapat dilihat gambaran realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016.

**Tabel 1**  
**Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016**

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rp.)	Realisasi Belanja (Juta Rp.)	Ratio Pendapatan terhadap Belanja	Surplus/Defisit (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	3 899 193	3 847 963	1,01	1,31
Kab. Kulonprogo	1 358 071	1 388 597	0,98	-2,25
Kab. Bantul	2 000 334	2 016 544	0,99	-0,81
Kab. Gunungkidul	1 654 345	1 651 554	1,00	0,17
Kab. Sleman	2 329 097	2 455 447	0,95	-5,42
Kota Yogyakarta	1 577 680	1 665 421	0,95	-5,56

Dari tabel tersebut dapat kita amati, bahwa rasio pendapatan/penerimaan daerah terhadap belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul lebih dari satu atau mengalami surplus anggaran. Hal ini berarti bahwa realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun 2016 sudah dapat mencukupi kebutuhan belanja daerah. Sedangkan rasio pendapatan/penerimaan daerah terhadap belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kulon Progo, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta kurang dari satu, berarti realisasi pendapatan yang diperoleh mengalami defisit anggaran atau realisasi pendapatan yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan belanja daerah sehingga perlu penambahan pendapatan dari pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta pada tahun 2016 memperoleh pendapatan/penerimaan sebesar 3,90 triliun rupiah dengan total pembelanjaan mencapai besaran 3,85 triliun rupiah. Dengan demikian pada tahun 2016 Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta mengalami surplus keuangan sebesar 51,23 miliar rupiah.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memperoleh pendapatan/penerimaan keuangan terbesar diantara kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mencapai nilai 2,33 triliun rupiah. Dengan belanja sebesar 2,46 triliun rupiah membuat kabupaten ini mengalami defisif anggaran sebesar 126,35 miliar rupiah pada tahun 2016.

Salah satu syarat yang diperlukan (*necessary condition*) untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah sebagaimana uraian sebelumnya, adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah tersebut telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu disamping sumber pembiayaan dari pemerintah diatasnya (berupa dana perimbangan) juga sumber pembiayaan dari dalam sendiri.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, tanpa mengurangi alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah yang dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah

Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Berbeda dengan pemerintah provinsi, jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Parkir

Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, menunjukkan bahwa daerah mampu untuk mencukupi belanja daerah sendiri.

Sumbangan PAD Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta dan pemerintah kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap total pendapatan ataupun terhadap total belanja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.

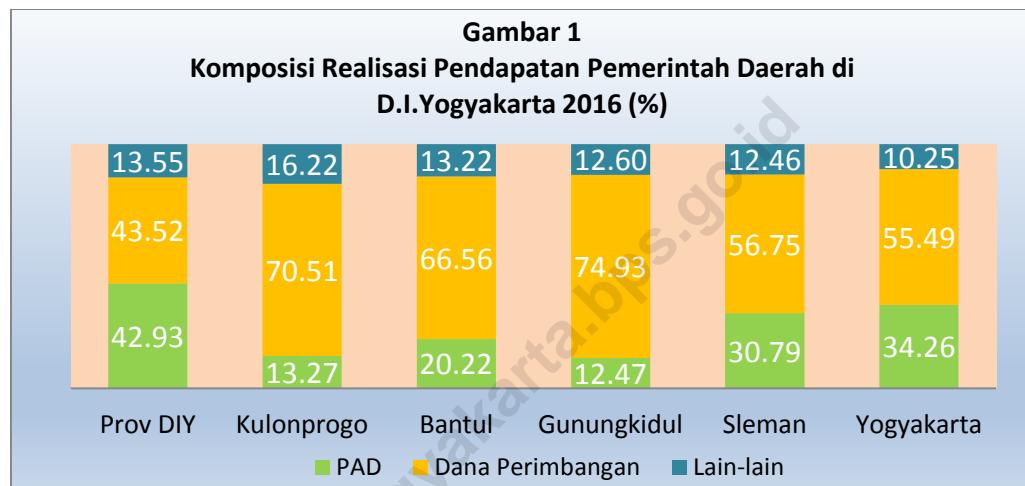
**Tabel 2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016**

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rp.)	Realisasi Belanja (Juta Rp.)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rp.)	PAD thd Pendapatan (%)	PAD thd Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	3 899 193	3 847 963	1 673 749	42,93	43,50
Kab. Kulonprogo	1 358 071	1 388 597	180 273	13,27	12,98
Kab. Bantul	2 000 334	2 016 544	404 455	20,22	20,06
Kab. Gunungkidul	1 654 345	1 651 554	206 279	12,47	12,49
Kab. Sleman	2 329 098	2 455 447	717 151	30,79	29,21
Kota Yogyakarta	1 577 680	1 665 421	540 504	34,26	32,45

Besaran sumbangan PAD terhadap pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 cukup bervariasi. Dari lima kabupaten/ kota

di D.I.Yogyakarta, Kota Yogyakarta merupakan kabupaten/kota yang mempunyai persentase PAD terbesar, yaitu mencapai 34,26 persen dari realisasi pendapatannya, disusul kemudian oleh Kabupaten Sleman dengan 30,79 persen. Kabupaten/kota dengan persentase PAD terhadap pendapatan yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu 12,47 persen. Sementara itu persentase PAD Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta cukup besar yaitu mencapai 42,93 persen terhadap realisasi pendapatannya.

Komposisi realisasi pendapatan untuk masing-masing pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



**Tabel 3**  
**Percentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan  
Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2012 – 2016**

Pemerintah Daerah	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I.Yogyakarta	46,23	38,87	46,65	46,86	42,93
Kab. Kulonprogo	8,39	9,57	14,16	13,92	13,27
Kab. Bantul	12,46	14,75	19,70	20,02	20,22
Kab. Gunungkidul	6,23	6,72	11,60	12,26	12,47
Kab. Sleman	18,94	23,65	27,61	28,03	30,79
Kota Yogyakarta	29,26	29,25	32,24	35,60	34,26

Dalam 5 tahun terakhir secara umum terdapat perubahan yang signifikan, persentase PAD terhadap realisasi pendapatan di 5 kabupaten/kota. Persentase PAD terhadap total pendapatan terbesar yaitu di Kabupaten Gunungkidul sebesar 100,16% persen, dari 6,23 persen pada Tahun 2012 menjadi 12,47 persen pada Tahun 2016. Persentase PAD terhadap realisasi pendapatan di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan

terkecil sebesar 17,09 %, yaitu dari 29,26 persen pada Tahun 2012 menjadi 34,26 persen pada Tahun 2016. Sementara untuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir dengan penurunan sebesar 7,14 %, yaitu dari 46,23 persen menjadi 42,93 persen.

Pada tabel 4 dapat dilihat persentase besarnya rencana pendapatan asli daerah terhadap rencana pendapatan dan rencana belanja, hal ini dilakukan untuk memacu peningkatan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

**Tabel 4**  
**Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap**  
**Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017**

Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rp.)	Rencana Belanja (Juta Rp.)	Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rp.)	PAD thd Rencana Pendapatan (%)	PAD thd Rencana Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	4 988 379	5 200 386	1 657 148	33,22	31,87
Kab. Kulonprogo	1 402 546	1 440 263	221 215	15,77	15,36
Kab. Bantul	2 078 243	2 161 337	369 225	17,77	17,08
Kab. Gunungkidul	1 819 288	1 837 111	192 375	10,57	10,47
Kab. Sleman	2 472 111	2 615 344	698 754	28,27	26,72
Kota Yogyakarta	1 510 297	1 644 124	511 133	33,84	31,09

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga akan memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, pada dasarnya dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun dalam rangka ekstensifikasi khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi daerah.

**Tabel 5**  
**Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah menurut**  
**Undang-undang nomor 33 Tahun 2004**

Jenis Pungutan	Pemerintah (%)	Provinsi Bersangkutan (%)	Kabupaten /kota Penghasil (%)	Kabupaten /Kota Lain dan Provinsi Bersangkutan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PBB <sup>1)</sup>	10,0	16,2	64,8	0,0
2. BPHTB	20,0	16,0	64,0	0,0
3. PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21	80,0	8,0	12,0	0,0
4. Kehutanan				
a. IHPH/IHH	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Provisi Sumber Daya Hutan	20,0	16,0	32,0	32,0
c. Reboisasi	60,0	0,0	40,0	0,0
5. Pertambangan Umum				
a. Land-Rent (Iuran Tetap)	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Royalty iuran Eksplorasi	20,0	16,0	32,0	32,0
6. Perikanan <sup>2)</sup>	20,0	0,0	0,0	0,0
7. Minyak Bumi	84,5	3,1	6,2	6,2
8. Gas Bumi	69,5	6,1	12,2	12,2
9. Panas Bumi	20,0	16,0	32,0	32,0

Catatan :

<sup>1)</sup> 9 % untuk biaya pemungutan

<sup>2)</sup> 80% untuk seluruh kabupaten/kota

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah selain dari PAD juga berasal dari Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta Lain-lain Penerimaan yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan bukan pajak. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil bukan pajak bersumber dari sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi). Dasar perolehan dana perimbangan dapat dilihat pada tabel 5.

Sumber pendapatan lain yang sangat berperan sampai sekarang adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dua puluh enam persen (26%) dari penerimaan APBN (penerimaan dari minyak dan gas, penerimaan pajak serta penerimaan dari non-migas dan non-pajak) dialokasikan untuk DAU. Sepuluh persen (10%) DAU dibagi ke provinsi, dan sembilan puluh persen (90%) dibagi ke kabupaten/kota.

Alokasi DAU tergantung dari bobot (tolok ukur) daerah. Penentuan Tolok Ukur (Bobot) didasarkan pada kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, yang selanjutnya berkembang menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lain. Potensi ekonomi daerah yang antara lain dapat dicerminkan dari potensi penerimaan yang diterima daerah seperti potensi industri, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi tolok ukur penentuan DAU.

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Pada dasarnya, dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan ketergantungan daerah pada pusat tentang keuangan daerah diharapkan semakin kecil (sumbang DAU kecil), atau dengan kata lain sumber pendapatan daerah bisa bersumber pada daerah sendiri.

Pada tahun 2016 besarnya DAU yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta sebesar 940,84 miliar rupiah atau mencapai 24,13 persen dari pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Besaran ini mampu mencukupi 24,45 persen dari belanja Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta pada tahun 2016.

Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta yang memiliki persentase DAU terhadap realisasi pendapatannya terendah adalah Kota Yogyakarta dengan 42,49 persen, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 43,55 persen. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul memiliki persentase DAU terhadap realisasi pendapatannya tertinggi yaitu mencapai 57,73 persen.

**Tabel 6**  
**Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016**

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rp.)	Realisasi Belanja (Juta Rp.)	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rp.)	DAU thd Pendapatan (%)	DAU thd Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	3 899 193	3 847 963	940 835	24,13	24,45
Kab. Kulonprogo	1 358 071	1 388 597	718 491	52,91	51,74
Kab. Bantul	2 000 334	2 016 544	999 814	49,98	49,58
Kab. Gunungkidul	1 654 345	1 651 554	954 997	57,73	57,82
Kab. Sleman	2 329 097	2 455 447	1 014 311	43,55	41,31
Kota Yogyakarta	1 577 680	1 665 421	670 279	42,49	40,25

Pada tabel 7 di bawah ini dapat dilihat besarnya persentase dana alokasi umum terhadap pendapatan asli pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta lima tahun terakhir yaitu dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016. Secara umum terjadi penurunan persentase besarnya dana alokasi umum terhadap pendapatan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan usaha pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan keuangan dari pusat melalui dana alokasi umum.

**Tabel 7**  
**Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 2012 - 2016**

Pemerintah Daerah	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	34,86	29,31	28,66	27,07	24,13
Kab. Kulonprogo	60,18	59,31	57,07	53,55	52,91
Kab. Bantul	57,42	56,23	52,33	48,32	49,98
Kab. Gunungkidul	63,91	62,72	61,72	54,57	57,73
Kab. Sleman	50,05	46,94	45,84	42,90	43,55
Kota Yogyakarta	46,32	45,60	42,39	43,40	42,49

Persentase dana alokasi umum (DAU) terhadap rencana anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se- Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 8.

**Tabel 8**  
**Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap**  
**Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017**

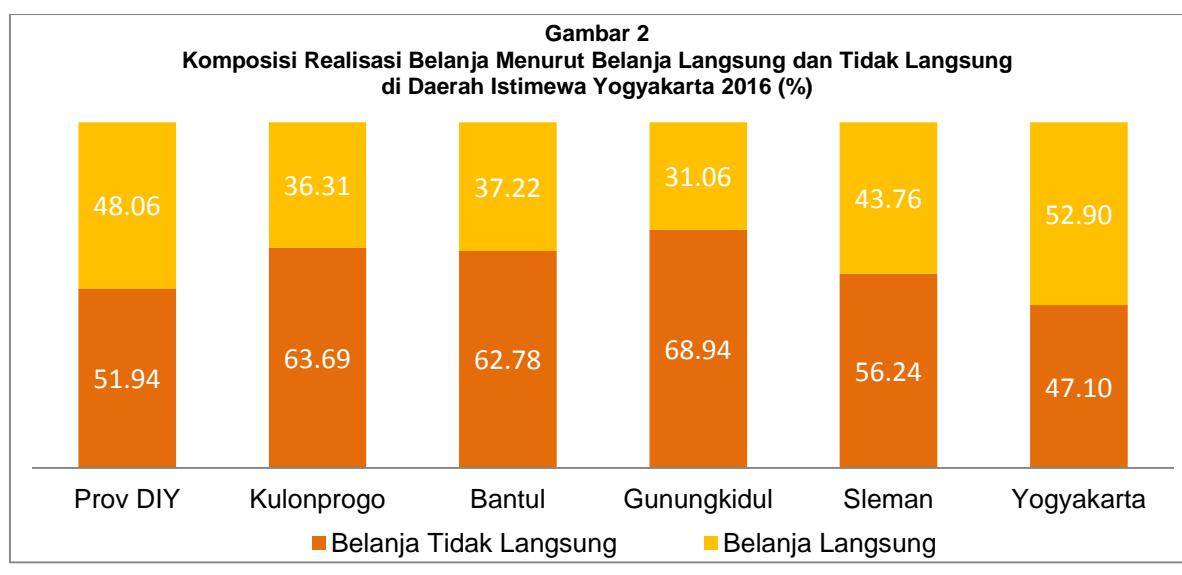
Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rp.)	Rencana Belanja (Juta Rp.)	Rencana Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rp.)	DAU thd Rencana Pendapatan (%)	DAU thd Rencana Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	4 988 379	5 200 386	1 380 357	27,67	26,54
Kab. Kulonprogo	1 402 546	1 440 263	718 491	51,23	49,89
Kab. Bantul	2 078 243	2 161 337	1 072 227	51,59	49,61
Kab. Gunungkidul	1 654 345	1 837 111	1 024 164	61,91	55,75
Kab. Sleman	2 472 111	2 615 344	1 051 042	42,52	40,19
Kota Yogyakarta	1 510 297	1 644 124	670 279	44,38	40,77

Dalam format lama, belanja daerah dibedakan menjadi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah mulai tahun 2007 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

**Tabel 9**  
**Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan**  
**Belanja Langsung Pemerintah Daerah**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016**

Pemerintah Daerah	Belanja Tidak Langsung (Juta Rp.)	Persentase terhadap Total Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung (Juta Rp.)	Persentase terhadap Total Belanja Langsung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	1998 596	51,94	1 849 367	48,06
Kab. Kulonprogo	884 392	63,69	504 205	36,31
Kab. Bantul	1 265 890	62,78	750 654	37,22
Kab. Gunungkidul	1 138 660	68,94	512 893	31,06
Kab. Sleman	1 380 996	56,24	1 074 451	43,76
Kota Yogyakarta	784 379	47,10	881 042	52,90

Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahannya selama tahun 2016 menghabiskan dana 1,99 triliun rupiah (51,94 persen dari total belanja) untuk belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Secara umum persentase pos pembelanjaan daerah pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta tahun 2016 sebagian besar masih digunakan untuk pos belanja tidak langsung.



Kota Yogyakarta mempunyai proporsi belanja tidak langsung yang paling rendah diantara kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 47,10 persen, diikuti Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul masing-masing sebesar 56,24 persen dan 62,78 persen. Sebaliknya daerah yang memiliki proporsi belanja tidak langsung terbesar adalah Kabupaten Gunungkidul dengan 68,94 persen terhadap realisasi belanja daerahnya.

**Tabel 10**  
**Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta 2012 - 2016**

Pemerintah Daerah	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I.Yogyakarta	60,33	57,40	52,34	53,26	51,26
Kab. Kulonprogo	67,08	67,94	65,44	64,12	65,12
Kab. Bantul	69,06	66,02	57,55	60,42	63,28
Kab. Gunungkidul	70,91	69,44	69,02	66,40	68,83
Kab. Sleman	70,00	62,60	57,73	56,60	59,29
Kota Yogyakarta	59,57	51,37	49,52	50,49	49,72

Jika kita cermati persentase belanja tidak langsung dalam lima tahun terakhir, terlihat bahwa secara umum mengalami penurunan, terutama pada tahun 2013 sampai dengan 2015, tetapi pada Tahun 2016 mengalami kenaikan. Untuk Tahun 2016 persentase belanja tidak langsung yang mengalami kenaikan persentase pada belanja tidak langsung, yaitu pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, dan Sleman. Sedangkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta mengalami penurunan.

Adapun persentase belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap rencana anggaran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 11.

**Tabel 11**  
**Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta 2017**

Pemerintah Daerah	Rencana Belanja Tidak Langsung (Juta Rp.)	Persentase thd Total Rencana Belanja Tidak Langsung	Rencana Belanja Langsung (Juta Rp.)	Persentase thd Total Rencana Belanja Langsung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	2 779 013	53,44	2 421 373	46,56
Kab. Kulonprogo	832 273	57,79	607 990	42,21
Kab. Bantul	1 253 539	58,00	907 797	42,00
Kab. Gunungkidul	1 161 906	63,25	675 205	36,75
Kab. Sleman	1 461 041	55,86	1 154 302	44,14
Kota Yogyakarta	682 709	41,52	961 415	58,48

Pada table 12 dapat dilihat bahwa realisasi belanja menurut fungsinya di semua Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta paling banyak membelanjakan anggarannya pada sektor pendidikan. Hal ini bisa terlihat dari persentase belanja di sektor pendidikan yang paling tinggi dibanding sektor lainnya, yaitu lebih dari 25%. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada penduduknya. Sektor yang memperoleh anggaran besar selanjutnya adalah sektor pelayanan umum, sektor kesehatan, dan sektor perumahan.

Berbeda dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, sektor pendidikan tidak memperoleh anggaran yang tinggi untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini dikarenakan fasilitas pendidikan di bawah SLTA menjadi urusan anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota. Anggaran terbesar untuk Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibelanjakan untuk sektor pelayanan umum, selanjutnya sektor lingkungan hidup, perumahan, ekonomi, pariwisata, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketertiban.

**Tabel 12**  
**Persentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya**  
**di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016**

Fungsi Belanja	Provinsi DIY	Kab Kulon progo	Kab Bantul	Kab Gunung kidul	Kab Sleman	Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	23,32	24,25	23,96	26,10	27,75	25,84
2. Ketertiban dan Keamanan	0,78	0,66	0,98	0,65	0,92	0,03
3. Ekonomi	11,91	6,57	4,69	4,85	7,83	5,52
4. Lingkungan Hidup	20,29	0,29	0,86	1,34	1,18	2,87
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	15,80	12,86	9,33	6,83	9,92	11,19
6. Kesehatan	8,54	17,02	19,05	14,69	17,98	16,74
7. Pariwisata dan Budaya	9,15	0,49	0,93	0,90	0,71	0,90
8. Pendidikan	7,94	37,28	39,49	43,62	33,16	35,32
9. Perlindungan Sosial	2,26	0,57	0,70	1,02	0,56	1,59
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Rencana prioritas belanja pada tahun anggaran 2017 tidak banyak berubah dibanding realisasi belanja tahun 2016. Hal ini terlihat dari besarnya persentase masing-masing sektor belanja yang tidak jauh berbeda dibanding realisasi anggaran tahun sebelumnya. Pada rencana anggaran pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, sektor pendidikan, pelayanan umum, kesehatan dan sektor perumahan dan fasilitas umum masih mendapatkan porsi belanja yang lebih besar dibanding sektor lainnya.

Sedangkan pada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta porsi belanja yang paling besar masih pada sektor pelayanan umum, diikuti sektor ekonomi dan lingkungan hidup. Persentase besarnya rencana belanja anggaran Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 13 di bawah ini.

**Tabel 13**  
**Persentase Rencana Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**2017**

Fungsi Belanja	Provinsi DIY	Kab Kulon progo	Kab Bantul	Kab Gunung kidul	Kab Sleman	Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	44.83	26.70	29.05	28.22	32.98	20.10
2. Ketertiban dan Keamanan	0.91	1.73	1.23	0.70	1.29	2.61
3. Ekonomi	7.12	8.14	6.80	4.79	6.21	12.16
4. Lingkungan Hidup	7.06	0.57	1.04	2.91	1.56	4.85
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	5.54	13.26	8.64	10.62	12.92	10.55
6. Kesehatan	3.43	17.39	19.18	13.02	14.51	18.07
7. Pariwisata dan Budaya	8.38	0.88	1.43	1.33	0.76	2.24
8. Pendidikan	21.46	30.37	31.77	37.21	29.01	27.79
9. Perlindungan Sosial	1.27	0.96	0.86	1.21	0.75	1.64
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



# LAMPIRAN TABEL



www.bps.yogyakarta.bps.go.id



**Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>3 899 192 985</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1 673 749 196	42,93
1.2	Dana Perimbangan	1 697 108 535	43,52
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	528 335 253	13,55
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>3 847 962 966</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1 998 595 549	51,94
2.2	Belanja Langsung	1 849 367 416	48,06
	Surplus	51 230 019	
	Pembiayaan Netto	140 879 688	

**Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1 673 749 196</b>	<b>42,93</b>
1.1	Pajak Daerah	1 440 571 519	36,95
1.2	Retribusi Daerah	36 603 883	0,94
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57 333 771	1,47
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	139 240 024	3,571
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1 697 108 535</b>	<b>43,52</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	113 065 428	2,90
2.2	Dana Alokasi Umum	940 835 434	24,13
2.3	Dana Alokasi Khusus	643 207 673	16,50
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>528 33 253</b>	<b>13,55</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>3 899 192 985</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 1.3 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1 998 595 549</b>	<b>51,94</b>
1.1	Belanja Pegawai	570 939 445	14,84
1.2	Belanja Bunga	0	0
1.3	Belanja Subsidi	0	0
1.4	Belanja Hibah	727 099 422	18,90
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1 919 000	0,05
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	611 852 157	15,90
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	86 724 508	2,25
1.8	Belanja Tidak Terduga	61 018	0,0016
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1 849 367 416</b>	<b>48,06</b>
2.1	Belanja Pegawai	136 990 455	3,56
2.2	Belanja Barang dan Jasa	875 503 249	22,75
2.3	Belanja Modal	836 873 712	21,75
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>3 847 962 966</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 1.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>4 988 379 318</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1 657 147 882	33,22
1.2	Dana Perimbangan	2 461 741 044	49,35
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	869 490 392	17,43
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>5 200 386 011</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	2 779 012 766	53,44
2.2	Belanja Langsung	2 421 373 245	46,56
Surplus		(212 006 693)	
Pembayaran Netto		212 006 693	

**Tabel 1.5 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1 657 147 882</b>	<b>33,22</b>
1.1	Pajak Daerah	1 437 942 970	28,83
1.2	Retribusi Daerah	38 797 470	0,78
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	59 711 580	1,20
1.4	Lain –lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	120 695 862	2,42
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2 461 741 044</b>	<b>49,35</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	132 300 017	2,65
2.2	Dana Alokasi Umum	1 380 356 648	27,67
2.3	Dana Alokasi Khusus	949 084 379	19,03
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>869 490 392</b>	<b>17,43</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>4 988 379 318</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 1.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2 779 012 766</b>	<b>53,44</b>
1.1	Belanja Pegawai	1 316 547 065	25,32
1.2	Belanja Bunga	0	0
1.3	Belanja Subsidi	0	0
1.4	Belanja Hibah	719 522 034	13,84
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2 091 000	0,04
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	601 307 079	11,56
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	114 625 863	2,20
1.8	Belanja Tidak Terduga	24 919 725	0,48
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2 421 373 245</b>	<b>46,56</b>
2.1	Belanja Pegawai	185 780 385	3,57
2.2	Belanja Barang dan Jasa	1 195 029.682	22,98
2.3	Belanja Modal	1 040 563 178	20,01
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>5 200 386 011</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2016 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1 358 070 875</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	180 273 364	13,27
1.2	Dana Perimbangan	957 551 589	70,51
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	220 245 922	16,22
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 388 596 506</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	884 391 750	63,69
2.2	Belanja Langsung	504 204 756	36,31
Surplus		(30 525 632)	
Pembayaran Netto		99 652 181	

**Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2016 (000Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>180 273 364</b>	<b>13,27</b>
1.1	Pajak Daerah	31 393 835	2,31
1.2	Retribusi Daerah	9 857 663	0,73
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14 317 820	1,05
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	124 704 046	9,18
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>957 551 589</b>	<b>70,51</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	26 387 202	1,94
2.2	Dana Alokasi Umum	718 490 508	52,91
2.3	Dana Alokasi Khusus	212 673 879	15,66
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>220 245 922</b>	<b>16,22</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>1 358 070 875</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2016 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>884 391 750</b>	<b>63,69</b>
1.1	Belanja Pegawai	705 425 036	50,80
1.2	Belanja Bunga	38 583	0,0028
1.3	Belanja Subsidi	0	0
1.4	Belanja Hibah	33 571 120	2,418
1.5	Belanja Bantuan Sosial	4 426 220	0,32
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	2 795 603	0,20
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	135 883 735	9,79
1.8	Belanja Tidak Terduga	2 251 453	0,16
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>504 204 756</b>	<b>36,31</b>
2.1	Belanja Pegawai	31 991 726	2,30
2.2	Belanja Barang dan Jasa	230 229 277	16,58
2.3	Belanja Modal	241 983 753	17,43
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>1 388 596 506</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2017 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1 402 546 138</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	221 215 013	15,77
1.2	Dana Perimbangan	979 213 034	69,82
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	202 118 091	14,41
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 440 263 093</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	832 272 968	57,79
2.2	Belanja Langsung	607 990 125	42,21
Surplus		(37 716 955)	
Pembayaran Netto		37 716 955	

**Tabel 2.5 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2017 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>221 215 013</b>	<b>15,77</b>
1.1	Pajak Daerah	81 519 038	5,81
1.2	Retribusi Daerah	8 840 603	0,63
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13 806 411	0,98
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	117 048 960	8,35
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>979 213 034</b>	<b>69,82</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	29 250 013	2,09
2.2	Dana Alokasi Umum	718 490 508	51,23
2.3	Dana Alokasi Khusus	231 472 513	16,50
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>202 118 091</b>	<b>14,41</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>1 402 546 138</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2017  
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>832 272 968</b>	<b>57,79</b>
1.1	Belanja Pegawai	615 789 620	42,76
1.2	Belanja Bunga	622 212	0,043
1.3	Belanja Subsidi	0	0
1.4	Belanja Hibah	22 914 500	1,59
1.5	Belanja Bantuan Sosial	27 586 200	1,92
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	9 400 826	0,65
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	153 959 610	10,69
1.8	Belanja Tidak Terduga	2 000 000	0,14
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>607 990 125</b>	<b>42,21</b>
2.1	Belanja Pegawai	32 818 934	2,28
2.2	Belanja Barang dan Jasa	280 502 543	19,48
2.3	Belanja Modal	294 668 648	20,46
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>1 440 263 093</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2016  
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2 000 334 166</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	404 454 704	20,22
1.2	Dana Perimbangan	1 331 352 777	66,56
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	264 526 685	13,22
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2 016 543 979</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1 265 890 290	62,78
2.2	Belanja Langsung	750 653 689	37,22
	Surplus	(16 209 813)	
	Pembayaran Netto	268 326 442	

**Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2016 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>404 454 704</b>	<b>20,22</b>
1.1	Pajak Daerah	133 474 742	6,67
1.2	Retribusi Daerah	26 613 086	1,33
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21 068 270	1,05
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah	223 298 606	11,16
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1 331 352 777</b>	<b>66,56</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	39 338 416	1,97
2.2	Dana Alokasi Umum	999 814 365	49,98
2.3	Dana Alokasi Khusus	292 199 996	14,61
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>264 526 685</b>	<b>13,22</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>2 000 334 166</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2016 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1265 890 290</b>	<b>62,78</b>
1.1	Belanja Pegawai	1 032 505 303	51,20
1.2	Belanja Bunga	0	0
1.3	Belanja Subsidi	0	0
1.4	Belanja Hibah	31 862 070	1,580
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3 267 350	0,16
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	12 429 995	0,62
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	185 304 700	9,19
1.8	Belanja Tidak Terduga	520 872	0,03
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>750 653 689</b>	<b>37,22</b>
2.1	Belanja Pegawai	44 678 753	2,22
2.2	Belanja Barang dan Jasa	421 914 403	20,92
2.3	Belanja Modal	284 060 533	14,09
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>2 016 543 979</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2078 242 752</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	369 224 767	17,77
1.2	Dana Perimbangan	1 435 225 760	69,06
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	273 792 225	13,17
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2 161 336 558</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1 253 539 145	58,00
2.2	Belanja Langsung	907 797 413	42,00
Surplus		(83 093 806)	
Pembayaran Netto		83 093 806	

**Tabel 3.5 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>369 224 767</b>	<b>17,77</b>
1.1	Pajak Daerah	121 001 500	5,82
1.2	Retribusi Daerah	23 638 270	1,14
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19 322 300	0,93
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	205 262 697	9,88
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1 435 225 760</b>	<b>69,06</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	40 935 405	1,97
2.2	Dana Alokasi Umum	1 072 226 613	51,59
2.3	Dana Alokasi Khusus	322 063 742	15,50
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>273 792 225</b>	<b>13,17</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>2 078 242 752</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul 2017 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1 253 539 145</b>	<b>58,00</b>
1.1	Belanja Pegawai	926 004 451	42,84
1.2	Belanja Bunga	0	0
1.3	Belanja Subsidi	0	0
1.4	Belanja Hibah	55 222 524	2,555
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3 829 400	0,18
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	14 330 195	0,66
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	235 152 575	10,88
1.8	Belanja Tidak Terduga	19 000 000	0,88
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>907 797 413</b>	<b>42,00</b>
2.1	Belanja Pegawai	66 234 783	3,06
2.2	Belanja Barang dan Jasa	525 944 841	24,33
2.3	Belanja Modal	315 617 789	14,60
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>2 161 336 558</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2016 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1 654 344 837</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	206 278 866	12,47
1.2	Dana Perimbangan	1 239 624 999	74,93
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	208 440 973	12,60
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 651 553 579</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1 138 660 158	68,94
2.2	Belanja Langsung	512 893 421	31,06
	Surplus	2 791 258	
	Pembiayaan Netto	198 261 973	

**Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2016 (000Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>206 278 866</b>	<b>12,47</b>
1.1	Pajak Daerah	37 544 018	2,27
1.2	Retribusi Daerah	32 082 078	1,94
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12 940 951	0,78
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	123 711 818	7,48
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1 239 624 999</b>	<b>74,93</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	30 631 002	1,85
2.2	Dana Alokasi Umum	954 997 369	57,73
2.3	Dana Alokasi Khusus	253 996 628	15,35
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>208 440 973</b>	<b>12,60</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>1 654 344 837</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2016 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1 138 660 158</b>	<b>68,94</b>
1.1	Belanja Pegawai	912 196 214	55,23
1.2	Belanja Bunga	1 353	0,0001
1.3	Belanja Subsidi	0	0
1.4	Belanja Hibah	13 884 600	0,841
1.5	Belanja Bantuan Sosial	0	0
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	8 824 866	0,53
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	203 753 125	12,34
1.8	Belanja Tidak Terduga	0	0
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>512 893 421</b>	<b>31,06</b>
2.1	Belanja Pegawai	26 842 131	1,63
2.2	Belanja Barang dan Jasa	251 360 756	15,22
2.3	Belanja Modal	234 690 534	14,21
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>1 651 553 579</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1 819 288 229</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	192 374 662	10,57
1.2	Dana Perimbangan	1 356 665 459	74,57
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	270 248 108	14,85
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 837 111 037</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1 161 905 599	63,25
2.2	Belanja Langsung	675 205 438	36,75
	Surplus	657 382 630	
	Pembiayaan Netto	17 822 808	

**Tabel 4.5 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>192 374 662</b>	<b>10,57</b>
1.1	Pajak Daerah	37 525 500	2,06
1.2	Retribusi Daerah	31 849 758	1,75
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13 660 323	0,75
1.4	Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109 339 081	6,01
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1 356 665 459</b>	<b>74,57</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	30 826 246	1,69
2.2	Dana Alokasi Umum	1 024 163 716	56,29
2.3	Dana Alokasi Khusus	301 675 497	16,58
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>270 248 108</b>	<b>14,85</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>1 819 288 229</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2017  
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1 161 905 599</b>	<b>63,25</b>
1.1	Belanja Pegawai	891 721 275	48,54
1.2	Belanja Bunga	0	0
1.3	Belanja Subsidi	0	0
1.4	Belanja Hibah	21 566 994	1,17
1.5	Belanja Bantuan Sosial	0	0
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	8 467 518	0,46
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	237 149 812	12,91
1.8	Belanja Tidak Terduga	3 000 000	0,16
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>675 205 438</b>	<b>36,75</b>
2.1	Belanja Pegawai	35 303 904	1,92
2.2	Belanja Barang dan Jasa	299 234 555	16,29
2.3	Belanja Modal	340 666 979	18,54
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>1 837 111 037</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2016  
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2 329 097 456</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	717 151 176	30,79
1.2	Dana Perimbangan	1 321 660 505	56,75
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	290 285 775	12,46
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2 455 446 949</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1 380 996 251	56,24
2.2	Belanja Langsung	1 074 450 697	43,76
Surplus		(126 349 493)	
Pembayaran Netto		464 117 988	

**Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2016 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>717 151 176</b>	<b>30,79</b>
1.1	Pajak Daerah	407 675 231	17,50
1.2	Retribusi Daerah	43 217 124	1,86
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42 031 675	1,80
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	224 227 146	9,63
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1 321 660 505</b>	<b>56,75</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	66 604 304	2,86
2.2	Dana Alokasi Umum	1 014 310 630	43,55
2.3	Dana Alokasi Khusus	240 745 571	10,34
2.4	Alokasi Dana Desa dari APBN	290 285 775	12,46
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>2 329 097 456</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>717 151 176</b>	<b>30,79</b>

**Tabel 5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2016 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1 380 996 251</b>	<b>56,24</b>
1.1	Belanja Pegawai	1 097 707 839	44,71
1.2	Belanja Bunga	3 021 102	0,1230
1.3	Belanja Subsidi	0	0
1.4	Belanja Hibah	40 024 505	1,630
1.5	Belanja Bantuan Sosial	29 383 789	1,20
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	43 485 615	1,77
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	166 884 664	6,80
1.8	Belanja Tidak Terduga	488 737	0,02
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1 074 450 697</b>	<b>43,76</b>
2.1	Belanja Pegawai	165 659 693	6,75
2.2	Belanja Barang dan Jasa	564 788 678	23,00
2.3	Belanja Modal	344 002 326	14,01
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>2 455 446 949</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 5.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2017 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2 472 110 989</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	698 754 167	28,27
1.2	Dana Perimbangan	1 518 943 281	61,44
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	254 413 541	10,29
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2 615 343 534</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1 461 041 345	55,86
2.2	Belanja Langsung	1 154 302 190	44,14
Surplus		(143 232 546)	
Pembayaran Netto		143 232 545	

**Tabel 5.5 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman 2017  
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>698 754 167</b>	<b>28,27</b>
1.1	Pajak Daerah	432 000 000	17,47
1.2	Retribusi Daerah	41 602 970	1,68
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41 431 694	1,68
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	183 719 503	7,43
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1 518 943 281</b>	<b>61,44</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	69 963 565	2,83
2.2	Dana Alokasi Umum	1 051 041 705	42,52
2.3	Dana Alokasi Khusus	397 938 011	16,10
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>254 413 541</b>	<b>10,29</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>2 472 110 989</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 5.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman 2017 (000Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1 461 041 345</b>	<b>55,86</b>
1.1	Belanja Pegawai	1 098 457 490	42,00
1.2	Belanja Bunga	3 106 424	0,12
1.3	Belanja Subsidi	0	0
1.4	Belanja Hibah	42 967 387	1,64
1.5	Belanja Bantuan Sosial	44 435 823	1,70
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	47 360 297	1,81
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	218 865 612	8,37
1.8	Belanja Tidak Terduga	5 848 312	0,22
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1 154 302 190</b>	<b>44,14</b>
2.1	Belanja Pegawai	159 181 422	6,09
2.2	Belanja Barang dan Jasa	607 606 403	23,23
2.3	Belanja Modal	387 514 365	14,82
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>2 615 343 534</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 6.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2016  
(000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1 577 679 933</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	540 504 305	34,26
1.2	Dana Perimbangan	875 430 545	55,49
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	161 745 083	10,25
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 665 420 971</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	784 378 708	47,10
2.2	Belanja Langsung	881 042 263	52,90
	Surplus	(87 741 038)	
	Pembiayaan Netto	205 392 524	

**Tabel 6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2016 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>540 504 305</b>	<b>34,26</b>
1.1	Pajak Daerah	334 057 894	21,17
1.2	Retribusi Daerah	42 111 064	2,67
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16 270 773	1,03
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	148 064 574	9,38
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>875 430 545</b>	<b>55,49</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	53 510 435	3,39
2.2	Dana Alokasi Umum	670 278 830	42,49
2.3	Dana Alokasi Khusus	151 641 280	9,61
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>161 745 083</b>	<b>10,25</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>1 577 679 933</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2016 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>784 378 708</b>	<b>47,10</b>
1.1	Belanja Pegawai	716 343 372	43,01
1.2	Belanja Bunga	0	0
1.3	Belanja Subsidi	0	0
1.4	Belanja Hibah	62 046 692	3,726
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1 545 555	0,09
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	3 031 139	0,18
1.8	Belanja Tidak Terduga	1 411 950	0,08
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>881 042 263</b>	<b>52,90</b>
2.1	Belanja Pegawai	163 774 278	9,83
2.2	Belanja Barang dan Jasa	457 678 643	27,48
2.3	Belanja Modal	259 589 341	15,59
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>1 665 420 971</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 6.4 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 2017 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1 510 296 678</b>	<b>100,00</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	511 132 838	33,84
1.2	Dana Perimbangan	883 018 834	58,47
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	116 145 006	7,69
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1 644 123 792</b>	<b>100,00</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	682 708 902	41,52
2.2	Belanja Langsung	961 414 890	58,48
Surplus		(133 827 114)	
Pembiayaan Netto		133 827 114	

**Tabel 6.5 Rencana Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta 2017  
(000Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>511 132 838</b>	<b>33,84</b>
1.1	Pajak Daerah	336 106 500	22,25
1.2	Retribusi Daerah	35 045 668	2,32
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25 909 452	1,72
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	114 071 218	7,55
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>883 018 834</b>	<b>58,47</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	62 454 190	4,14
2.2	Dana Alokasi Umum	670 278 830	44,38
2.3	Dana Alokasi Khusus	150 285 814	9,95
<b>III</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>116 145 006</b>	<b>7,69</b>
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>1 510 296 678</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 6.6 Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta 2017 (000 Rp)**

No	Rincian	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>682 708 902</b>	<b>41,52</b>
1.1	Belanja Pegawai	620 187 655	37,72
1.2	Belanja Bunga	0	0
1.3	Belanja Subsidi	0	0
1.4	Belanja Hibah	56 403 185	3,43
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1 907 400	0,12
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0	0
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	1 210 662	0,07
1.8	Belanja Tidak Terduga	3 000 000	0,18
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>961 414 890</b>	<b>58,48</b>
2.1	Belanja Pegawai	173 574 964	10,56
2.2	Belanja Barang dan Jasa	493 438 681	30,01
2.3	Belanja Modal	294 401 244	17,91
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>		<b>1 644 123 792</b>	<b>100,00</b>

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183

Telp. (0274) 4342234, Fax. (0274) 4342230

E-mail: bps3400@bps.go.id Homepage: <http://yogyakarta.bps.go.id>

ISSN 2598-2664



9 772598 266007